

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Evaluasi Program

1. Konsep Dasar Evaluasi Program

a. Pengertian Evaluasi Program

Evaluasi dapat didefinisikan sebagai suatu proses mempertimbangkan suatu hal atau gejala dengan menggunakan patokan-patokan tertentu yang bersifat kualitatif, seperti "baik atau buruk", "kuat atau lemah", "cukup atau belum cukup", dan sebagainya. Kata evaluasi berasal dari bahasa Inggris "*evaluation*" yang mengandung kata dasar "nilai".¹⁷ Menurut Stufflebeam yang dikutip oleh H. Daryanto, evaluasi merupakan proses menggambarkan, memperoleh, dan menyajikan informasi yang berguna untuk menilai alternatif keputusan.¹⁸

Sebagaimana yang dikutip oleh Sebastianus Widanarto Prijowuntato, bahwa evaluasi berhubungan dengan keputusan nilai (*value judgement*). Di bidang pendidikan, evaluasi dapat dilakukan terhadap kurikulum baru, suatu kebijakan pendidikan, sumber belajar tertentu, atau kinerja guru.¹⁹ Dengan evaluasi, peserta didik dapat mengetahui sejauh mana keberhasilan yang telah dicapai selama pendidikan. Jika peserta didik mendapatkan nilai yang memuaskan, itu

¹⁷ Ajat Rukajat, "Teknik Evaluasi Pembelajaran", 1st ed. (Yogyakarta: Depublish, 2018). 2

¹⁸ Daryanto, "Evaluasi Pendidikan", (Jakarta: Rineka Cipta, 2012). 10

¹⁹ S. Widanarto Prijowuntato, "Evaluasi Pembelajaran", 1st ed. (Yogyakarta: Sanata Dharma University Press, 2016). 6

akan berfungsi sebagai stimulus yang akan mendorong mereka untuk lebih baik lagi.

Menurut Tayibnapis yang dikutip oleh Ika Sriyanti menungkapkan bahwa evaluasi program dalam konteks tujuan yaitu sebagai proses menilai sampai sejauhmana tujuan pendidikan dapat dicapai.²⁰

Evaluasi program adalah upaya sistematis untuk mempelajari apa yang berharga dan bernilai dari suatu hal. Itu berfokus pada perhatian penentu kebijakan dan penyandang dana, dan biasanya memasukkan pertanyaan tentang alasan mengapa program telah mencapai tujuan yang diinginkan. Pada setiap tahap, keputusan yang dibuat digunakan sebagai indikator penilaian kinerja.²¹

Program adalah suatu rencana yang terdiri dari berbagai unit yang mengandung kebijakan dan kumpulan tindakan yang harus dilakukan dalam jangka waktu tertentu. Evaluasi adalah proses mengumpulkan informasi tentang bagaimana sesuatu berfungsi dan menggunakan informasi tersebut untuk membuat keputusan terbaik.²²

Menurut Briekerhoff yang dikutip oleh Rusydi Ananda dan Tien Rafida, evaluasi program merupakan suatu proses menemukan sejauhmana tujuan dan sasaran suatu program yang telah terealisasi, memberikan informasi untuk pengambilan keputusan,

²⁰ Ika Sriyanti, "Evaluasi Pembelajaran Matematika", 1st ed. (Ponorogo, 2019). 3

²¹ Agustanico Dwi Muryadi, "Model Evaluasi Program Dalam Penelitian Evaluasi," 2017, 7–8.

²² Wicka Yunita Dwi Utami, Martini Jamaris, and Sri Martini Meilanie, "Evaluasi Program Pengelolaan Lembaga PAUD di Kabupaten Serang," *Jurnal Obsesi : Jurnal Pendidikan Anak Usia Dini* 4, no. 1 (October 4, 2019): 67, <https://doi.org/10.31004/obsesi.v4i1.259>. 67-68

membandingkan kinerja dengan standar yang ditentukan untuk mengetahui adanya kesenjangan atau tidaknya, dan penilaian secara terstruktur tentang kualitas suatu objek.²³

Berdasarkan pemaparan diatas maka dapat disimpulkan bahwa evaluasi program merupakan suatu kegiatan yang saling berhubungan yang bertujuan mengumpulkan informasi mengenai bentuk implementasi dari suatu kebijakan, berlangsungnya dalam proses yang berkesinambungan, dan terjadinya dalam suatu organisasi yang melibatkan sekelompok orang untuk pengambilan keputusan.

2. Evaluasi Program Model CIPP

a. Pengertian Evaluasi Program Model CIPP

Ada banyak model evaluasi yang dikembangkan oleh para ahli yang dapat dipakai dalam mengevaluasi yakni model *Kirkpatrick*, *CIPP*, *Wheel*, *Provus*, *Stake*, *Brinkerhoff* dan lain sebagainya. Tetapi pada penelitian ini, peneliti hanya fokus pada evaluasi model CIPP yang dikemukakan oleh Stufflebeam & Shinkfield yang berorientasi pada pengambilan keputusan. Menurut Stufflebeam yang telah dikutip oleh Mawardi Lubis, model evaluasi CIPP merupakan kegiatan yang komperhensif untuk mengarahkan pelaksanaan evaluasi

²³ Rusydi Ananda and Tien Rafida, "Pengantar Evaluasi Program Pendidikan", 1st ed. (Sumatera Utara: Perdana Publishing, 2017). 6-10

formatif dan evaluasi sumatif terhadap objek program, proyek, personalia, produk, institusi, dan sistem.²⁴

Model evaluasi CIPP lebih lengkap karena mencakup evaluasi formatif dan sumatif. Evaluasi konteks, input, proses, dan produk dapat dipraktikkan dalam rangka pengambilan keputusan (peran formatif) dan penyajian informasi mengenai akuntabilitas (peran sumatif). Evaluasi konteks digunakan untuk mengumpulkan dan menganalisis data evaluasi kebutuhan untuk menentukan tujuan, prioritas, dan sasaran. Evaluasi input digunakan untuk mendapatkan sumber daya dan langkah-langkah yang diperlukan untuk mencapai tujuan tersebut.

Evaluasi proses digunakan dalam pengambilan keputusan untuk mengetahui apakah pelaksanaan telah sesuai dengan petunjuk dan rencana, apakah ada konflik, apakah ada dukungan moral dan staf, kekuatan dan kelemahan material, dan masalah penganggaran. Dan evaluasi produk digunakan untuk mengukur hasil dan membandingkannya dengan hasil yang diharapkan, pengambilan keputusan menjadi lebih mampu untuk menentukan apakah program harus dilanjutkan, diubah, atau dihentikan sama sekali..²⁵

b. Model Evaluasi CIPP

²⁴ Mawardi Lubis, "Evaluasi Program dan Kelembagaan Pendidikan Islam", 1st ed. (Bengkulu: CV. Zigie Utama, 2021). 165-167

²⁵ Syahrir Mandala, Yetti Supriyati, and Azra Fauzi, "Evaluasi Dampak Program Pendidikan Jarak Jauh (PJJ) Melalui Model CIPP Pada Dosen Aspek Pembelajaran Pada Masa Pandemi Covid 19," *Jurnal Ilmiah Mandala Education* 7, no. 1 (January 2021): 145–46, <http://dx.doi.org/10.58258/jime.v7i1.1716>.

Model evaluasi terdapat 4 aspek evaluasi yakni *context*, *input*, *process*, dan *product*. Dari masing-masing jenis tersebut memiliki makna masing-masing yaitu :²⁶

a. Evaluasi *Context*

Evaluasi konteks adalah gambaran tentang lingkungan program, kebutuhan yang belum dipenuhi, karakteristik populasi, sampel orang yang dilayani, dan tujuan program. Hal ini membantu dalam membuat keputusan, menentukan kebutuhan yang harus dipenuhi, dan merumuskan tujuan program.

Evaluasi ini berfungsi dalam hal mengidentifikasi dan menilai segala kebutuhan yang mendasari disusunnya suatu program. Dengan evaluasi ini tujuan program yang akan dicapai digambarkan secara jelas. Maka evaluasi konteks dapat dikatakan sebagai evaluasi terhadap keadaan yang melingkupi proses pembelajaran. Keadaan yang dimaksud adalah yang berasal dari lingkungan yaitu kondisi aktual dengan kondisi yang diharapkan.

Evaluasi konteks dirancang untuk memberikan gambaran keadaan yang sedang dilakukan oleh suatu lembaga pendidikan. Jadi, evaluasi ini mengatakan bahwa lembaga pendidikan tidak diharuskan mempunyai suatu kurikulum baru terlebih dahulu untuk melakukan kegiatan evaluasi.

b. Evaluasi *Input*

²⁶ Rinto Hasiholan Hutapea, "Evaluasi Pembelajaran Model CIPP Sebagai Alat Ukur Keberhasilan Mengajar Guru Pendidikan Agama Kristen" 7 (2022): 174–75.

Fokus utama evaluasi masukan adalah menentukan cara tujuan program dicapai. Evaluasi masukan dapat membantu dalam pengambilan keputusan, menentukan sumber-sumber yang ada, pilihan yang diambil, rencana dan strategi untuk mencapai tujuan, dan prosedur kerja untuk mencapainya.

Evaluasi masukan mencakup sumber daya manusia, sarana dan peralatan pendukung, dana dan anggaran, serta berbagai prosedur dan aturan yang diperlukan. Tujuan evaluasi ini adalah untuk membantu dalam pengambilan keputusan, menentukan sumber daya yang tersedia, pilihan apa yang harus diambil, dan rencana dan strategi untuk memenuhi kebutuhan. Selanjutnya, evaluasi masukan mencakup apakah peserta didik akan mampu mengikuti pelajaran dan menyelesaikan tugas yang diberikan.

c. Evaluasi *Process*

Evaluasi proses adalah²⁷ mengecek pelaksanaan suatu rencana/program. Evaluasi proses dilakukan untuk memperkirakan atau memprediksi rancangan prosedur atau rancangan implementasi selama tahap implementasi, menyediakan informasi untuk keputusan program dan sebagai rekaman atau arsip prosedur yang telah terjadi. Evaluasi proses meliputi data-data penilaian yang telah ditentukan dan diterapkan dalam praktik pelaksanaan program.

²⁷ Eka Damayanti, Misykat Malik Ibrahim, and Muh. Ilyas Ismail, "Evaluation of Online Learning Programs at Universities Using the CIPP Model," *Jurnal Educative: Journal of Educational Studies* 6, no. 1 (January 1, 2022): 95, <https://doi.org/10.30983/educative.v6i1.4678>.

Evaluasi proses diarahkan pada seberapa jauh kegiatan yang dilakukan dalam program tersebut telah terlaksana sesuai rencana apa belum. Evaluasi proses melingkupi hal-hal yang dilakukan dalam praktik implementasi program. Pada tahap ini dikaitkan dengan program penerapan. dalam evaluasi proses ini memberikan pertanyaan-pertanyaan seperti pelaksanaan program, sumber daya manusia yang terlibat, problematika yang dihadapi saat penerapan program, dan fasilitas penunjang.

d. Evaluasi *Product*

Evaluasi produk adalah cara untuk mengukur seberapa baik mencapai tujuan. Evaluasi ini mencatat hasil yang dicapai serta keputusan yang dibuat mengenai perbaikan dan aktualisasi. Mengukur dan menafsirkan hasil adalah aktivitas evaluasi produk. Pengukuran dikembangkan dan dikelola dengan teliti. Keakuratan analisis akan digunakan sebagai dasar untuk pengambilan keputusan dan pengajuan sarana sesuai dengan standar kelayakan. Secara umum, evaluasi produk mencakup menetapkan tujuan operasional program, menetapkan standar pengukuran yang telah dicapai, melakukan perbandingan antara rumusan tujuan dan kenyataan lapangan, dan membuat penafsiran rasional. Tujuan dari kegiatan evaluasi pada tahap ini adalah untuk membantu proses pengambilan keputusan. Pertanyaan yang diajukan mencakup hasil yang dicapai.

B. Kurikulum Merdeka

1. Konsep Dasar Kurikulum Merdeka

a. Pengertian Kurikulum Merdeka

Kurikulum diartikan dengan berbagai penafsiran, awalnya istilah “Kurikulum” diartikan *a running course*, yang berasal dari bahasa Latin *curriculum* dan bahasa Perancis *Courire* yang berarti *to run*. Istilah itu kemudian digunakan untuk sejumlah mata pelajaran (*course*) yang harus ditempuh untuk mencapai suatu gelar penghargaan dalam dunia pendidikan, yang dikenal dengan ijazah.

Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 pasal 1 menyatakan bahwa “kurikulum merupakan seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu”²⁸

Kurikulum saat ini mengatur pendidikan di Indonesia. Indonesia saat ini menetapkan Kurikulum Merdeka sebagai standar pendidikan untuk menyesuaikan perkembangan teknologi dan ilmu pengetahuan. Pendidikan tidak dapat dilaksanakan tanpa kurikulum, dan tujuan pendidikan pun tidak akan terwujud. Kurikulum secara dasar didefinisikan dalam kamus Webster tahun 1857 sebagai rencana sejumlah mata pelajaran yang harus dipelajari siswa untuk naik ke tingkatan pendidikan selanjutnya. Dengan kata lain, suatu

²⁸Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 pasal 1 Tentang Sistem Pendidikan Nasional

kurikulum dianggap sebagai sarana penting untuk mencapai tujuan perolehan ijazah tertentu.²⁹

Kurikulum merdeka memiliki pembelajaran yang beragam, sehingga peserta didik memiliki kesempatan untuk mempelajari konsep dan menguatkan kemampuan mereka. Guru dapat memilih berbagai metode pembelajaran agar pembelajaran dapat disesuaikan dengan kebutuhan belajar dan minat peserta didik. Proyek untuk meningkatkan pencapaian profil pelajar pancasila dikembangkan dengan tema tertentu yang ditetapkan oleh pemerintah. Proyek tersebut tidak diarahkan untuk mencapai target capaian pembelajaran tertentu, sehingga tidak terikat pada konteks mata pelajaran.³⁰

Kurikulum merdeka memposisikan siswa sebagai subjek dan pelaku utama dalam pembelajaran karena itu siswa diberikan keleluasaan dan kebebasan untuk membuat rencana sampai mengambil keputusan. Buktinya dalam kurikulum merdeka para siswa menjalankan proses pembelajaran sendiri tidak perlu menunggu keputusan guru yang selalu banyak pertimbangan dalam mengambil keputusan. Kurikulum merdeka lahir dengan target menyempurnakan kurikulum yang sudah ada bukan karena ganti menteri ganti kurikulum. Perubahan kurikulum merupakan

²⁹ Hadi Widodo, "Pelaksanaan Evaluasi Kurikulum di MTs Al-Jihad," *Al-Fatih : Jurnal Pendidikan dan Keislaman*, no. 2 (2020): 86–88.

³⁰ Shinta Ledia and Betty Mauli Rosa Bustam, "Implementasi Kurikulum Merdeka Dalam Meningkatkan Mutu Pendidikan," *Reslaj : Religion Education Social Laa Roiba Journal* 6, no. 1 (August 9, 2023): 790–816, <https://doi.org/10.47467/reslaj.v6i1.2708>.

kewajaran karena berdasarkan pada tuntutan kebutuhan zaman yang terus berubah pada setiap dekade.³¹

b. Tujuan Kurikulum Merdeka

Implementasi kurikulum merdeka dilakukan untuk menjawab keluhan dan problematika yang terjadi pada kurikulum sebelumnya. Implementasi kurikulum ini menekankan pada bakat dan minat peserta didik dalam mengembangkan potensi yang mereka punya. Implementasi kurikulum ini dapat menjadikan peserta didik berkompeten sesuai bidang yang diminatinya, serta dapat berkembang sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi masa sekarang.

Implementasi kurikulum ini lebih berfokus pada bakat dan minat peserta didik dalam meningkatkan potensi yang mereka punya dan dapat menjadikan peserta didik berkompeten sesuai bidangnya, serta dapat berkembang sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi masa sekarang.

Dari penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa dalam hal ini evaluasi mengenai kurikulum merupakan kegiatan dalam mengumpulkan suatu informasi tentang suatu kegiatan yang mana disini adalah informasi mengenai kurikulum untuk digunakan sebagai pertimbangan terhadap nilai dan arti kurikulum dalam aspek tertentu.

³¹ Ayi Suherman, "Implementasi Kurikulum Merdeka: Teori dan Praktik Kurikulum Merdeka Belajar Penjas SD", *Bandung : Indonesia Emas Group*, Vol.1 (September 2023), hlm. 58-60

Hasil evaluasi kurikulum dapat digunakan sebagai bahan untuk mempertimbangkan penyempurnaan kurikulum karena kondisi kurikulum selalu berubah dan berubah. Hasil evaluasi dapat menunjukkan apakah program-program yang direncanakan dilaksanakan atau tidak, dan memberikan informasi tentang apakah kurikulum sedang disempurnakan atau tidak. Berdasarkan hasil evaluasi ini, keputusan mengenai penyempurnaan atau revisi kurikulum dapat dibuat berdasarkan hasil yang diharapkan.³²

2. Kebijakan Kurikulum Merdeka di Indonesia

Pendidikan di Indonesia menjadi hal yang harus menjadi sorotan, hal itu sesuai yang tercantum pada undang-undang dasar 1945 bahwa pendidikan mempunyai tujuan untuk mencerdaskan masyarakat Indonesia, tidak ada bagian dari rakyat Indonesia yang tidak pandai baca tulis, sehingga tidak mampu lagi bangsa lain menjajah bangsa Indonesia. Maka menyempurnakan pendidikan di Indonesia sampai hari ini menjadi suatu kewajiban bagi semua elemen yang tercantum dalam kemajuan pendidikan. Perubahan kurikulum di Indonesia sudah terjadi 11 kali perubahan hingga saat ini, pada tahun 2022 berupaya secara nasional mengimplementasikan kurikulum merdeka dengan melihat pelaksanaan kurikulum sebelumnya. Sesuai dengan pengamatan yang dilakukan oleh pemangku kebijakan pendidikan, maka dapatlah formulasi baru

³² Lise Chamisijatin and Fendy Hardian Permana, "Telaah Kurikulum", *Malang : UMMPress*, Vol.1 (Februari 2020), hlm. 75-78

kurikulum dengan nama ‘*kurikulum merdeka*’ yang meliputi mandiri belajar dan mandiri berubah.³³

Teori progresivitas John Dewey menyatakan bahwa siswa berhak untuk berkembang sesuai dengan kemampuan, kemampuan, dan kecerdasan masing-masing, yang mendasari kurikulum bebas ini. Ketika semua sumber daya manusia di lembaga pendidikan memahami secara efektif kurikulum merdeka, termasuk insentif guru untuk berinovasi dalam pengembangan diri mereka, dan Pancasila dianggap sebagai dasar yang digunakan dalam membentuk pendidikan karakter peserta didik, akan dihasilkan siswa yang muti talenta dengan memperhatikan peraturan yang harus diikuti dan yang tidak. Dengan mengingat hal ini, lembaga pendidikan dapat mempertahankan pendidikan karakter sebagai fokus utama kurikulum, termasuk kurikulum merdeka.³⁴

Kenapa Kemdikbud memutuskan untuk menerapkan kebijakan kurikulum merdeka untuk semua sekolah? karena mengidentifikasi masalah yang ada dalam tubuh pendidikan itu. Pendidikan adalah hak bagi semua rakyat Indonesia, dan tujuan pendidikan adalah untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Undang-undang Sisdiknas juga menegaskan bahwa pendidikan harus menghasilkan siswa yang beriman, bertakwa, berakhlak mulia, mandiri, kreatif, bertanggungjawab, dan demokratis, yang merupakan bagian dari makna pendidikan karakter.

³³ Teti Rosminda and Fadriati, “Kebijakan Kurikulum Merdeka Upaya Meningkatkan Pendidikan Karakter di Indonesia,” *PIWULANG: Jurnal Pendidikan Agama Islam* 5, no. 2 (2023): 195–97, <https://doi.org/10.32478/piwulang.v5i2.1516>.

³⁴ Leni Nurindah Lailatul Fitriana, Nur Ahid, and Guntur Eko Prasetyo, “Kebijakan Pokok dan Strategi Implementasi Kurikulum Merdeka Belajar di Indonesia,” *Journal On Teacher Education* 4, no. 2 (2022): 1507–8.

Semuanya digabungkan ke dalam satu kurikulum yang akan menentukan tujuan dan jalan pendidikan nasional.

Keputusan Menteri Agama (KMA) No. 347 Tahun 2022 Tentang Pedoman Implementasi Kurikulum Merdeka Pada Madrasah mengatur penerapan kurikulum merdeka di madrasah. Pedoman ini mendorong dan memberi ruang yang seluas-luasnya kepada madrasah untuk mengembangkan kurikulum operasional yang sesuai dengan potensi dan kekhasan mereka sendiri, sesuai dengan tingkat satuan pendidikan.

Tidak semua madrasah menerapkan kurikulum merdeka. Ini karena keputusan Kurikulum, Sarana, Kelembagaan, dan Kesiswaan (KSKK) Kementerian Agama RI menetapkan bahwa madrasah harus mendaftar di Pangkalan Data Ujian Madrasah (PDUM) sebelum dapat berpartisipasi dalam proyek pilot madrasah pelaksana kurikulum merdeka. Surat Keputusan (SK) Direktorat Jenderal Pendidikan Islam menetapkan madrasah pelaksana kurikulum merdeka.³⁵

C. Pembelajaran Fikih pada Kurikulum Merdeka

1. Konsep Pembelajaran Fikih

Pembelajaran adalah kumpulan elemen manusiawi, bahan, fasilitas, perlengkapan, dan prosedur yang saling berpengaruh untuk mencapai tujuan pembelajaran. Sistem pembelajaran terdiri dari peserta didik, pendidik, dan staf lainnya. Material termasuk buku, film, dan audio; fasilitas dan perlengkapan termasuk komputer, ruang kelas, dan

³⁵ Sri Apriatni et al., "Analisis Kesiapan Madrasah Dalam Mengimplementasikan Kurikulum Merdeka (Studi Di MAN 2 Kota Serang)," *JIIP-Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan* 6, no. 1 (2023): 436.

perangkat audio visual; dan prosedur termasuk jadwal, metode penyampaian, belajar, dan sebagainya. Unsur-unsur ini saling berhubungan, atau berinteraksi satu sama lain..³⁶

Menurut Gagne dan Bringgs, pembelajaran merupakan suatu rangkaian (kejadian, peristiwa, kondisi, dan lain-lain) yang secara sengaja disusun untuk mempengaruhi anak didik sehingga proses pembelajaran dapat berlangsung dengan mudah. Pembelajaran tidak hanya terbatas pada kejadian yang dilakukan oleh guru saja, tetapi juga mencakup semua kejadian maupun kegiatan yang mungkin mempunyai pengaruh langsung pada proses belajar peserta didik.

Secara umum, perubahan dalam pendidikan membawa transformasi dalam proses pembelajaran. Proses pembelajaran ini tentunya akan mengikuti pola kurikulum yang berlaku setiap tahunnya. Pada saat ini, pendidikan kita telah beralih ke sistem pendidikan kurikulum merdeka belajar, yang tidak banyak mengalami perubahan selain penambahan modul belajar. Jika kurikulum diperbarui, hal itu juga akan berdampak pada materi pelajaran. Pelajaran Fiqih terkesan monoton dan tidak berkembang karena materinya tidak berubah seperti materi sains dan sosiologi yang dapat berubah seiring waktu. Ini membuat pelajaran menjadi membosankan dan tidak menarik..³⁷

Kata fiqih dalam bahasa arab berasal dari kata faqiha yafqahu-fiqhan yang artinya mengerti atau memahami. Secara terminologi fiqih

³⁶ Mohammad Rizqillah Masykur, "Metodologi Pembelajaran Fiqih," *Jurnal Al-Makrifat* 4, no. 2 (Oktober 2019). 34-35

³⁷ Seten Hartedi, "Desain Pembelajaran Materi Fiqih Dalam Perspektif Kurikulum Merdeka Belajar," *Ta'dibuna: Jurnal Pendidikan Islam* 7, no. 2 (2023): 48-50.

berarti ilmu mengenai hukum-hukum syar'i yang bersifat amaliah yang digali dan ditemukan dari dalil-dalil yang tafsil. Berdasarkan definisi ini, fiqih dianggap sebagai ilmu karena fiqih itu semacam ilmu pengetahuan.³⁸

Berdasarkan uraian diatas, maka penulis menyimpulkan bahwa pembelajaran fikih adalah proses pendidikan yang bertujuan untuk memahami dan mempelajari prinsip-prinsip hukum Islam yang mencakup norma-norma, aturan, dan tata cara dalam agama Islam. Fiqih merupakan salah satu cabang ilmu agama Islam yang berkaitan dengan pemahaman hukum-hukum agama, termasuk hukum ibadah, muamalah, dan etika dalam Islam.

Dalam pembelajaran fikih, siswa belajar untuk memahami dan menerapkan prinsip-prinsip fikih dalam kehidupan sehari-hari, termasuk dalam ibadah, hubungan sosial, ekonomi, dan masalah-masalah kehidupan lainnya. Pembelajaran fikih melibatkan pemahaman terhadap teks-teks agama, seperti Al-Qur'an dan Hadis, serta interpretasi dan pendapat para ulama tentang masalah-masalah fikih.

Tujuan dari pembelajaran fikih adalah untuk membimbing individu agar dapat menjalani kehidupan sesuai dengan prinsip-prinsip Islam, menjalankan ibadah dengan benar, serta menghadapi berbagai situasi kehidupan dengan pengetahuan yang sesuai dengan ajaran Islam. Sesuai yang tertera dalam Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam No. 3211 Tahun 2022 Tentang Capaian Pembelajaran PAI dan Bahasa

³⁸ Satria Wiguna, *Fiqih Ibadah*, 1st ed. (Banyumas: CV. Pena Persada 2021). 2

Arab Kurikulum Merdeka Pada Madrasah bahwa Pembelajaran Fikih di madrasah secara bertahap dan holistik diarahkan untuk menyiapkan peserta didik yang memiliki kompetensi memahami hukum-hukum Islam sehingga memungkinkan peserta didik menjalankan kewajiban beragama dengan baik terkait hubungan dengan Allah Swt., maupun sesama manusia dan alam semesta.³⁹

Dalam pembelajaran fikih terdapat capaian pembelajaran pada masing-masing fase. Capaian pembelajaran merupakan kompetensi pembelajaran yang harus dicapai peserta didik pada setiap fase, memahami capaian pembelajaran merupakan langkah pertama yang sangat penting karena merupakan kompetensi pembelajaran yang harus dicapai siswa dalam setiap fase, mulai dari fase fondasi, yang memberikan tujuan umum dan waktu yang cukup untuk mencapainya.

Setiap pendidik harus tahu apa yang mereka ajarkan, terlepas dari apakah mereka akan membuat kurikulum, alur tujuan pembelajaran, atau silabus mereka sendiri. Pada penelitian ini difokuskan pada Madrasah Tsanawiyah di kelas VII yang terdapat dalam fase D, pada akhir fase D, pada elemen fikih ibadah, peserta didik terbiasa bersuci dan menjalankan shalat fardlu maupun sunah, terbiasa puasa fardlu maupun sunah dengan baik dan benar, serta memahami ketentuan haji dan umrah untuk menumbuhkan kesadaran menjalankan 5 (lima) rukun Islam secara lengkap. Di samping itu peserta didik terbiasa melakukan ibadah lain yang memiliki dimensi sosial, antara lain: zakat, infak, sedekah, kurban,

³⁹ Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam No. 3211 Tahun 2022

akikah, dan lain-lain sesuai syarat dan rukunnya dengan baik dan benar, sehingga amaliah ibadahnya dapat membentuk kepedulian sosial dan mempengaruhi cara berfikir, bersikap, dan bertindak dalam kehidupan sehari-hari dalam konteks beragama, berbangsa, dan bernegara.

2. Fikih pada Madrasah Tsanawiyah dalam Kurikulum Merdeka

Madrasah Tsanawiyah merupakan bagian dari sistem pendidikan Islam di Indonesia dan menyediakan pendidikan bagi siswa kelas 7-9. Kurikulum MTs mencakup mata pelajaran sekuler seperti matematika, IPA, dan IPS serta mata pelajaran agama seperti Al-Qur'an, hukum islam, dan Sejarah Islam. Ketika membahas tentang hukum islam di MTs maka akan dibahas dalam pembelajaran fiqh. Pembelajaran fiqh adalah bagian penting dari kurikulum pendidikan Islam. Fiqh merupakan disiplin ilmu yang mempelajari hukum-hukum Islam yang berkaitan dengan kehidupan sehari-hari, seperti ibadah, muamalah (urusan keuangan), dan adab (tata cara). Pembelajaran fiqh di MTs memiliki peran yang sangat penting dalam membentuk karakter dan identitas siswa sebagai generasi muda muslim yang taat dan berkualitas. Hal ini menjadikan pembelajaran fiqh sangat penting di MTs karena dapat meningkatkan pemahaman siswa tentang hukum-hukum Islam serta memperkuat identitas dan martabat siswa sebagai umat Islam.

Implementasi kurikulum merdeka dalam pembelajaran fiqh dapat dilakukan untuk meningkatkan nilai karakter peserta didik. Guru dapat memanfaatkan pembelajaran fiqh untuk memperkenalkan nilai-nilai Islam

yang harus diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Guru diharapkan dapat memfasilitasi peserta didik untuk mengembangkan potensi dan minat mereka dengan cara kreatif dan inovatif sehingga pembelajaran menjadi lebih bermakna dan relevan bagi siswa. Misalnya, guru dapat memanfaatkan pembelajaran fiqh untuk membahas masalah sosial yang terdapat di sekitar peserta didik dan membantu peserta didik untuk menemukan solusinya. Melalui pembelajaran fiqh di kurikulum merdeka maka siswa diharapkan dapat memanfaatkan kesempatan untuk memperoleh pemahaman yang baik dan benar mengenai ajaran Islam serta menjadi individu yang taat beragama⁴⁰

Pembelajaran Fikih di Madrasah Tsanawiyah, yang memiliki standar kompetensi lulusan yang bertujuan agar peserta didik dapat memahami dan menerapkan syariat Islam dengan benar dalam kehidupan sehari-hari, harus diadaptasi dengan baik dalam isi pembelajaran dan harus disajikan dengan pendekatan yang lebih relevan dengan konteks, bukan hanya fokus pada teks semata. Tujuan dari pendekatan ini adalah untuk menghindari salah tafsir dalam beragama, yang saat ini menjadi sumber kekhawatiran.

Penerapan kurikulum Merdeka dalam pembelajaran mata pelajaran fikih bertujuan untuk meningkatkan karakter dan kemampuan berinovasi peserta didik. Guru memiliki peluang untuk mengintegrasikan

⁴⁰ Nisa Afrinauly Nabila and Muh Wasith Achadi, "Implementasi Kurikulum Merdeka Dalam Pembelajaran Fiqh di Madrasah Tsanawiyah," *AT TAJDID: Jurnal Pendidikan dan Pemikiran Islam* 07, no. 02 (2023): 306.

nilai-nilai Islam yang relevan dengan kehidupan sehari-hari peserta yang dibesarkan melalui pembelajaran fikih.⁴¹

Karena kurikulum merdeka tidak lagi dibatasi oleh kurikulum, guru harus kreatif untuk membimbing siswa mereka dan memberikan arahan sesuai dengan konsep merdeka belajar. Guru dan siswa harus kreatif untuk memperoleh pengetahuan. Peserta didik benar-benar dilatih untuk berkembang secara mandiri. Sejujurnya, guru yang ideal memainkan peran yang sangat penting dalam meningkatkan kualitas pendidikan ke arah yang lebih baik. Terutama, guru agama bidang studi fiqh berfungsi sebagai pedoman bagi siswa dalam membimbing dan mengarahkan mereka agar memiliki kepribadian dan moral Islami, berwawasan tinggi, dan memahami ajaran Islam secara menyeluruh.

Kurikulum belajar mandiri sangat bermanfaat dan penting untuk mendukung pendidikan. Guru fiqh harus siap untuk menerapkannya, yaitu dengan mengubah berbagai aspek pembelajaran mereka untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dan menjadi pedoman dalam pembelajaran untuk diterapkan dalam kehidupan nyata.⁴²

⁴¹ Muhammad Fuadzy Al Khadziq and Muh. Wasith Achadi, "Implementasi Kurikulum Merdeka Belajar pada Mata Pelajaran Fiqih," *Al-Liqo: Jurnal Pendidikan Islam* 8, no. 2 (December 30, 2023): 200–211, <https://doi.org/10.46963/alliqo.v8i2.1500>.

⁴² Nurzamsinar, Sudirman, and Widya Astrina, "Persepsi Guru Fiqih Tentang Konsep Merdeka Belajar Pada Kelas X di MAN 2 Polewali Mandar Kecamatan Matakali Kabupaten Polewali Mandar," *Inspiratif Pendidikan* 12, no. 2 (December 31, 2023): 686–700, <https://doi.org/10.24252/ip.v12i2.44563>.